

TRANSFORMASI PERAN ORANG TUA DALAM PENENTUAN *BŌWŌ* DI DESA HILIZIHŌNŌ, NIAS

Clara Septa Fransiska Daliwu¹, Sulian Ekomila², Supsilani³, Kris Suspon Rama⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Corresponden E-Mail; sulianekomila@unimed.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk memaparkan kajian mengenai perubahan peran orang tua dalam penentuan *bōwō* (mahar) pada etnis Nias di desa Hilizihōnō. Artikel yang berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data pada penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap informan yang dipilih secara purposif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perubahan peran orang tua dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal keluarga, khususnya pergeseran pola komunikasi menuju komunikasi yang lebih dialogis, serta faktor eksternal yang meliputi kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, modernisasi, dan transformasi nilai sosial-keagamaan. Perubahan ini ditandai dengan pergeseran relasi dari pola hierarkis menuju pola yang lebih egaliter dan partisipatif. Selain itu, pertimbangan dalam penentuan *bōwō* mengalami pergeseran dari orientasi simbolik ke orientasi yang lebih fungsional, seperti kesejahteraan bersama dan kesepakatan antarpasangan. Secara keseluruhan, perubahan tersebut mencerminkan proses adaptasi dan rekonstruksi budaya yang memungkinkan tradisi tetap relevan dan berkelanjutan di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

Kata kunci : *Bōwō*, peran orang tua, transformasi, rekonstruksi budaya, etnis Nias

Abstract

The purpose of this paper is to examine how the Nias ethnic group in Hilizihōnō Village views the evolving role of parents in deciding bōwō (bridewealth). The study employed a qualitative approach with a descriptive design, utilizing data collection methods that included observation, in-depth interviews, and documentation of informants' responses, all of whom were purposively selected. The findings reveal that shifts in parental roles are shaped by an interplay of internal family dynamics most notably, the transition toward more dialogical communication patterns alongside external factors such as economic conditions, educational attainment, modernization, and evolving socio-religious values. This transformation is characterized by a transition from hierarchical to more egalitarian and participatory family relationships. Furthermore, the criteria for determining bōwō (bridewealth) have shifted from a predominantly symbolic orientation toward more functional considerations, including the economic welfare of the couple and the principle of mutual agreement. Taken together, these changes reflect an ongoing process of cultural adaptation and reconstruction, through which the tradition continues to sustain its relevance and endure within an ever-evolving social environment.

Keywords: *Bōwō*, parental role, transformation, cultural reconstruction, Nias ethnicity.

Pendahuluan

Perkawinan dipahami tidak hanya sebagai penyatuan dua individu yang terlibat dalam ikatan perkawinan secara personal. Perkawinan juga berfungsi sebagai institusi sosial yang fundamental dan mengikat dua keluarga besar dalam sistem nilai, norma, dan tatanan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Sebagai institusi sosial, perkawinan memiliki peran yang jauh lebih luas dari sekadar hubungan antara dua orang. Hal ini karena perkawinan dipahami sebagai fondasi bagi terbentuknya unit sosial baru yang berperan penting dalam reproduksi budaya dan keberlangsungan struktur sosial masyarakat.

Ikatan perkawinan tidak hanya bersifat formal dan legal sebagaimana diakui oleh hukum negara maupun hukum adat. Akan tetapi juga mencakup dimensi emosional yang mendalam,

dimensi spiritual yang menghubungkan manusia dengan kepercayaan dan nilai-nilai transenden. Termasuk pula didalamnya dimensi budaya yang kaya yang secara aktif mempererat dan memperkuat hubungan antara dua kelompok keluarga yang mungkin memiliki latar belakang, kebiasaan, tradisi, dan simbol budaya yang berbeda-beda.

Perkawinan sering kali menjadi tempat negosiasi sosial yang mencerminkan dan mengungkapkan dinamika hubungan kekuasaan, struktur kekerabatan, dan dinamika perubahan masyarakat. Oleh karena itu, tradisi perkawinan tidak bersifat statis atau beku dalam satu bentuk yang tetap dan tidak berubah. Sebaliknya, tradisi ini terus mengalami transformasi dan adaptasi yang dinamis seiring dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta perkembangan zaman yang mempengaruhi masyarakat pendukungnya. Perubahan-perubahan tersebut dapat berlangsung secara perlahan dan bertahap, maupun secara cepat sebagai respons terhadap tekanan eksternal seperti globalisasi, modernisasi, dan kemajuan teknologi. Sehingga, tradisi perkawinan mencerminkan kemampuan suatu masyarakat untuk menyeimbangkan antara pelestarian nilai-nilai leluhur dengan tuntutan kehidupan kontemporer.

Mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, atau yang dalam etnis Nias dikenal dengan istilah *bōwō* (mahar), merupakan salah satu komponen paling sentral dan tidak terpisahkan dalam tradisi perkawinan etnis Nias. *Bōwō* (mahar) bukan sekadar kewajiban adat yang harus dipenuhi secara formal, melainkan merupakan cerminan dari nilai-nilai luhur yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dalam kehidupan sosial dan budaya etnis Nias. Keberadaan *bōwō* (mahar) dalam prosesi perkawinan menjadi penanda penting yang membedakan perkawinan adat etnis Nias dari tradisi perkawinan etnis lainnya, sekaligus mencerminkan identitas budaya yang khas dan unik dari masyarakat etnis Nias itu sendiri.

Bōwō (mahar) memiliki makna simbolik sebagai bentuk penghormatan, kasih sayang, dan pengakuan terhadap status sosial keluarga perempuan selain memiliki nilai material (Gulo & Telaumbanua, 2021; Lafau & Fitriani, 2023). Penentuan *bōwō* (mahar) dalam sistem adat Nias secara tradisional berada dalam otoritas keluarga, terutama orang tua pihak perempuan. Mereka membuat keputusan utama berdasarkan status sosial, nilai budaya, dan aturan adat yang berlaku (Savitri & Zalukhu, 2016).

Sejumlah penelitian terkini menunjukkan bahwa praktik dan kebiasaan *bōwō* (mahar) pada etnis Nias telah mengalami perubahan yang cukup besar dan signifikan, baik dari segi makna, nilai, maupun cara pelaksanaannya dalam kehidupan sosial masyarakat modern. Beberapa penelitian terkini memperlihatkan bahwa praktik *bōwō* (mahar) pada etnis Nias telah mengalami pergeseran makna yang signifikan. Waruwu & Karliani (2024) serta (Mendrofa, 2024) menemukan bahwa *bōwō* (mahar) yang semula dipandang sebagai simbol kasih sayang dan penghormatan terhadap keluarga perempuan, kini cenderung bergeser menjadi beban ekonomi. Pergeseran ini didorong oleh modernisasi, perubahan orientasi pendidikan yang semakin pragmatis, dan perubahan struktur sosial. Akibatnya, nilai *bōwō* (mahar) yang dulunya didasarkan pada kesepakatan adat kini lebih sering ditentukan oleh kalkulasi ekonomi, sehingga makna spiritualnya perlahan tergantikan oleh logika transaksional.

Lebih lanjut, diungkapkan juga bahwa proses negosiasi dalam penentuan *bōwō* (mahar) kini mengalami kompleksitas yang semakin meningkat, dengan melibatkan beragam aktor sosial yang memiliki kepentingan berbeda-beda (Lafau & Fitriani, 2023; Tampubolon et al., 2024). Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa perubahan tidak hanya mencakup

makna *bōwō* (mahar) itu sendiri, melainkan juga meliputi mekanisme dan relasi sosial yang mendasari serta mengatur proses penentuannya.

Namun, kajian-kajian sebelumnya umumnya cenderung berfokus pada aspek pergeseran makna dan proses negosiasi *bōwō* (mahar). Sementara itu, penelitian mengenai aspek-aspek yang menyebabkan perubahan peran orang tua dalam penentuan *bōwō* (mahar) masih sangat terbatas. Hal ini terutama dalam konteks lokal di tingkat desa. Namun, perubahan peran orang tua merupakan indikator penting untuk memahami transformasi struktur otoritas dalam keluarga sekaligus dinamika hubungan antar generasi dalam masyarakat adat. Selain itu, penelitian antropologi modern memperlihatkan bahwa interaksi antara modernisasi, pendidikan, nilai agama, dan keadaan ekonomi sering membentuk kembali hubungan kekuasaan dalam keluarga (Jones, 2017; Ronald & Baker, 2000).

Perubahan peran orang tua dalam penentuan *bōwō* (mahar) di Desa Hilizihōnō menarik untuk dikaji karena memperlihatkan adanya pergeseran dari otoritas absolut menuju otoritas yang lebih demokratis dan berpartisipasi. Perubahan ini mengindikasikan bahwa masyarakat telah berubah dalam hal ekonomi dan sosial. Mereka juga memperlihatkan pergeseran nilai, yang menempatkan kebahagiaan dan kebebasan pasangan sebagai prioritas utama dalam perkawinan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari faktor-faktor yang mendorong perubahan peran orang tua untuk memahami bagaimana tradisi lokal dapat tetap hidup dan berubah sesuai dengan modernisasi.

Berdasarkan penjelasan ini, artikel ini inovatif karena mengkaji transformasi tradisi *bōwō* (mahar) dari sudut pandang perubahan peran orang tua sebagai pihak penting dalam pengambilan keputusan adat, bukan hanya dari segi makna atau proses negosiasi. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mempelajari bagaimana peran orang tua berubah dalam penentuan *bōwō* (mahar) pada etnis Nias di Desa Hilizihōnō. Studi ini diharapkan dapat meningkatkan kajian antropologi, terutama yang berkaitan dengan dinamika perubahan budaya dan hubungan kekuasaan dalam keluarga dalam masyarakat adat.

METODE PENELITIAN

Untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan perubahan peran orang tua dalam penentuan *bōwō* (mahar) pada masyarakat etnis Nias di Desa Hilizihōnō, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, pengalaman, dan dinamika sosial yang terjadi dalam praktik budaya masyarakat (Creswell & Creswell, 2023).

Penelitian ini dilakukan di Desa Hilizihōnō, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan. Pemilihan lokasi didasarkan pada temuan bahwa desa tersebut menunjukkan adanya perubahan dalam proses penentuan *bōwō* (mahar), khususnya terkait pergeseran peran orang tua dalam pengambilan keputusan adat. Selanjutnya, informan penelitian ditentukan melalui teknik purposive, yaitu penentuan informan yang relevan serta memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan tradisi/budaya yang diteliti. Informan tersebut meliputi tokoh adat, tokoh agama, orang tua yang memiliki anak perempuan, serta masyarakat umum. Data yang diperoleh melalui teknik purposive sampling disesuaikan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2022).

Untuk mendapatkan data, penelitian ini menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memahami praktik sosial dalam penentuan *bōwō* (mahar). Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman serta perspektif informan, dan dokumentasi berfungsi melengkapi sekaligus memvalidasi data lapangan. Untuk

meningkatkan keabsahan hasil penelitian, kombinasi metode ini digunakan untuk melakukan triangulasi data (Miles et al., 2018).

Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, merangkum, mengelompokkan, serta memfokuskan informasi yang relevan, sehingga data yang terkumpul dari observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi dapat dipahami secara lebih terarah. Setelah itu, data disajikan dalam bentuk narasi atau kategorisasi tertentu agar pola, tema, dan hubungan antargejala yang muncul dapat terlihat dengan jelas. Pada tahap berikutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara membandingkan temuan antar-sumber data, meninjau kembali hasil yang dianggap penting, serta menegaskan keterkaitan temuan dengan faktor-faktor penyebab perubahan peran orang tua dalam penentuan *bōwō* (mahar). Proses ini dilakukan berulang kali untuk menemukan pola, kategori, dan hubungan yang terkait dengan komponen yang menyebabkan perubahan peran orang tua dalam penentuan *bōwō* atau mahar (Miles et al., 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, peran orang tua yang mengalami perubahan dalam penentuan *bōwō* (mahar) pada etnis Nias di Desa Hilizihōnō dibahas secara analitis dalam kerangka perubahan sosial dan budaya. Perubahan tersebut tidak hanya dipahami sebagai pergeseran praktik dari waktu ke waktu. Akan tetapi juga sebagai hasil dari interaksi berbagai faktor seperti dinamika pendidikan, pengaruh nilai-nilai baru, perubahan pola relasi dalam keluarga, serta semakin terbukanya akses informasi dari luar lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, paparan diarahkan untuk memperlihatkan bagaimana orang tua menegosiasikan nilai-nilai lama dengan tuntutan zaman, baik dalam cara mereka menentukan *bōwō* (mahar) maupun dalam pertimbangan-pertimbangan yang melatarinya.

Sebagai konteks awal, memahami karakteristik informan yang menjadi sumber data penelitian merupakan hal yang penting. Hal ini diasumsikan bahwa latar belakang sosial dapat menjadi factor yang memengaruhi cara pandang mereka terhadap perubahan praktik *bōwō* (mahar). Perbedaan usia, pengalaman hidup, tingkat pendidikan, pekerjaan, serta posisi informan dalam struktur keluarga atau komunitas dapat memunculkan variasi dalam menilai tradisi dan perubahan yang terjadi. Melalui informasi dari informan, penelitian ini dapat menangkap sejauh mana perubahan dipandang sebagai sesuatu yang wajar, perlu dipertahankan dalam bentuk tertentu, atau justru dianggap menggeser nilai-nilai yang selama ini dianggap penting.

Profil informan disajikan dalam Tabel 1 sebagai dasar untuk membaca temuan-temuan penelitian secara lebih terarah. Tabel tersebut memberikan gambaran ringkas mengenai latar belakang sosial informan sehingga pembaca dapat memahami konteks dari setiap pandangan yang dikemukakan. Sehingga, uraian mengenai peran orang tua dalam penentuan *bōwō* (mahar) tidak berdiri sendiri, melainkan ditopang oleh data yang relevan dan dipahami sesuai dengan karakteristik partisipan penelitian, yang pada akhirnya membantu menjelaskan proses perubahan sosial-budaya yang berlangsung di Desa Hilizihōnō.

Tabel 1. Profil Informan

No	Nama Informan	Usia (Thn)	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir
----	---------------	---------------	------------------	------------------------

1	K. Daliwu	49	L	S1
2	T. Bawaulu	76	L	Tidak Sekolah
3	S. Nehe	68	P	Tidak Sekolah
4	H. Wau	75	L	Tidak Sekolah
5	S. Harimao	69	L	Tidak Sekolah
6	S. Sihura	54	L	SMP
7	M. Sihura	47	P	SD
8	S. Zebua	28	L	S1
9	N. Duha	64	L	Tidak Sekolah
10	S. Laia	41	P	S1
11	F. Nehe	24	L	S1
12	H. Nehe	29	L	S1
13	D. Lase	30	L	S2
14	B. Bali	80	L	Tidak Sekolah

Sumber : Data primer hasil penelitian, 2026

Informan dalam penelitian ini didominasi oleh kelompok usia dewasa hingga lanjut usia, dengan komposisi pendidikan yang beragam mulai dari tidak sekolah sampai dengan jenjang perguruan tinggi. Keberagaman karakteristik responden sebagaimana tercantum pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa pandangan mengenai praktik dan penentuan *bōwō* (mahar) tidak lahir dari satu latar generasi saja, melainkan merupakan hasil pertemuan antara pengalaman hidup yang berbeda. Pada satu sisi, kelompok yang lebih tua umumnya masih kuat memegang nilai-nilai adat serta mengacu pada pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun. Pada sisi lain, kelompok yang telah menempuh pendidikan formal cenderung lebih terbuka terhadap cara pandang baru yang dipengaruhi proses pembelajaran, informasi, serta arus modernisasi.

Berdasarkan perspektif antropologi, heterogenitas aktor tersebut menunjukkan adanya multiple perspectives dalam sistem budaya, yakni tidak ada satu sudut pandang tunggal yang sepenuhnya dominan (Eriksen, 2023). Perbedaan latar usia, pendidikan, dan pengalaman memunculkan diskusi, negosiasi, dan reinterpretasi nilai dalam praktik sosial. Pada konteks ini, keputusan terkait penentuan *bōwō* (mahar) dapat dipahami sebagai proses yang melibatkan pertimbangan sosial-budaya yang dinamis, baik melalui diskusi keluarga, pengaruh tokoh adat, maupun pertimbangan yang bersifat rasional berdasarkan pengetahuan yang dipelajari. Oleh karena itu, perubahan peran orang tua dalam penentuan *bōwō* (mahar) tidak dapat dimaknai sebagai sekadar perubahan individu yang terjadi secara langsung, melainkan sebagai konsekuensi dari interaksi sosial yang kompleks antara tradisi dan modernitas, serta antara beragam cara pandang yang berkembang di dalam komunitas.

Perubahan Relasi dan Pola Komunikasi dalam Keluarga

Peran orang tua yang berubah dalam penentuan *bōwō* (mahar) berkaitan erat dengan dinamika relasi yang terus berkembang di dalam keluarga. Perubahan tersebut terlihat terutama pada pola komunikasi orang tua dengan anak. Bermula dari komunikasi yang cenderung satu arah menjadi lebih dialogis, dari instruksi langsung menjadi pendekatan yang lebih mempertimbangkan pendapat dan kebutuhan anak. Selanjutnya, dari cara-cara tradisional ke pembiasaan diskusi yang berorientasi pada pemahaman bersama. Melalui perubahan cara berinteraksi ini, keputusan yang semula dominan ditentukan oleh orang tua mulai bergeser menjadi proses yang melibatkan anak secara lebih aktif, baik dalam bentuk menyampaikan pertimbangan, menegosiasikan pilihan, maupun menyesuaikan aturan sesuai kondisi yang dihadapi.

Sehubungan dengan hal tersebut, melalui data pada Tabel 2, dapat dilihat keterkaitan antara perubahan relasi keluarga, pola komunikasi orang tua-anak, dan cara bagaimana proses penentuan *bōwō* (mahar) mengalami transformasi dari waktu ke waktu.

Tabel 2. Faktor-Faktor Penyebab Perubahan

No	Tema Faktor		Deskripsi Temuan
1	Perubahan komunikasi pasangan	pola	Calon mempelai kini berdiskusi terlebih dahulu sebelum proses adat
2	Pengaruh agama/spiritual	nilai	Penentuan <i>bōwō</i> (mahar) lebih mengutamakan kasih sayang dan nilai religius
3	Pendidikan modernisasi	dan	Pendidikan membuat generasi muda lebih rasional dan berani berpendapat
4	Demokratisasi keluarga	dalam	Orang tua tidak lagi otoriter, melainkan memberi ruang keputusan pada anak
5	Kondisi ekonomi		Penentuan <i>bōwō</i> (mahar) disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pasangan
6	Perubahan sosial	perspektif	Masyarakat lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan adat
7	Kemandirian finansial anak		Anak yang menanggung biaya pernikahan lebih dominan dalam keputusan
8	Akses informasi		Informasi dari pendidikan dan lingkungan memengaruhi pola pikir

Sumber : Data primer hasil penelitian, 2026

Salah satu komponen utama yang memengaruhi perubahan peran orang tua adalah perubahan gaya komunikasi, sebagaimana ditunjukkan dalam data dari tabel 2. Pada kondisi sebelumnya, komunikasi dalam keluarga cenderung bersifat satu arah: orang tua memegang otoritas penuh dan anak hanya menerima arahan tanpa banyak kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Pola seperti ini membuat keputusan cenderung ditetapkan sepihak, sehingga anak lebih berperan sebagai pihak yang mengikuti daripada pihak yang terlibat.

Relasi kekuasaan dalam keluarga telah mengalami pergeseran dari pola hierarkis, di mana orang tua memegang kendali penuh menuju pola yang lebih egaliter, yaitu relasi yang lebih setara dan saling mempertimbangkan. Pada pola hierarkis, keputusan keluarga umumnya ditentukan oleh otoritas orang tua tanpa banyak ruang bagi anggota keluarga lain. Namun, pada pola egaliter, otoritas tidak lagi sepenuhnya terpusat pada orang tua, melainkan dinegosiasikan bersama melalui diskusi, pertimbangan kebutuhan, dan kesepakatan antaranggota keluarga. Perubahan ini memperlihatkan adanya transformasi hubungan kekuasaan yang lebih dialogis, sehingga anggota keluarga, termasuk anak atau anggota yang lebih muda, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan ikut menentukan arah keputusan keluarga.

Selain itu, temuan bahwa anggota keluarga yang lebih muda lebih sering terlibat dalam pengambilan keputusan keluarga, menguatkan gagasan tentang perubahan nilai sosial dalam keluarga. Keterlibatan yang semakin besar ini mencerminkan pergeseran dari nilai kepatuhan semata (patuh pada keputusan pihak yang lebih berwenang) menuju nilai partisipasi (ikut berperan, memberi masukan, dan memengaruhi keputusan). Melalui partisipasi tersebut, keluarga tidak hanya menjadi ruang sosialisasi, tetapi juga arena latihan demokrasi dalam skala kecil, di mana komunikasi terbuka dan rasa saling menghargai menjadi prinsip penting. Sehingga, transformasi ini bukan hanya mengubah cara keluarga berfungsi, tetapi juga mengubah bagaimana otoritas dimaknai dan bagaimana relasi kekuasaan dibangun dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan temuan Killen & Smetana (2022) serta Ronald & Baker (2000).

Berikutnya, untuk temuan yang memperlihatkan perbandingan antara aspek-aspek yang mengalami perubahan praktik dari masa dulu (tradisional) dan saat ini ditampilkan pada tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan Tradisi Penentuan *Bōwō* (Mahar) Dulu dan Sekarang

Aspek	Dulu	Sekarang
Pengambil keputusan	Orang tua	Anak + orang tua
Pola komunikasi	Satu arah	Dua arah (dialog)
Fungsi <i>bōwō</i> (mahar)	Status sosial	Kesepakatan & kasih
Nilai utama	Kehormatan	Kebahagiaan
Sifat keputusan	Absolut	Demokratis
Pertimbangan	Adat	Adat + ekonomi + pendidikan
Peran anak	Pasif	Aktif
Peran orang tua	Dominan	Pendukung

Sumber : Data primer hasil penelitian, 2026

Tabel 3 memperlihatkan adanya pergeseran relasi kekuasaan dalam keluarga dari pola hierarkis menuju pola yang lebih egaliter. Pada pola hierarkis, otoritas pengambilan keputusan umumnya terkonsentrasi pada orang tua, sehingga anggota keluarga lain cenderung memiliki ruang partisipasi yang terbatas dalam menyampaikan aspirasi maupun argumentasi. Sebaliknya, pada pola yang lebih egaliter, orang tua tidak lagi berperan sebagai satu-satunya penentu keputusan, melainkan lebih banyak bertindak sebagai fasilitator yang mengarahkan proses negosiasi keluarga. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa otoritas dalam keluarga modern cenderung bergeser dari kontrol sepihak menuju proses perundingan yang melibatkan anak sebagai pihak aktif dalam pengambilan keputusan (Smetana & Rote, 2019). Selain itu, dari perspektif perubahan sosial, modernisasi mendorong transformasi nilai dari kepatuhan terhadap otoritas menuju partisipasi dan otonomi individu dalam keluarga. Akibatnya, pola relasi keluarga menjadi berubah (Ronald & Baker, 2000).

Transformasi ini sejalan dengan temuan Smetana & Rote (2019) yang menyatakan bahwa keluarga dalam masyarakat modern mengalami perubahan menuju relasi yang lebih partisipatif. Pada keangka tersebut, perubahan komunikasi dipahami sebagai faktor yang memengaruhi tidak hanya proses pengambilan keputusan, tetapi juga struktur otoritas di dalam keluarga. Perubahan komunikasi terlihat pada meningkatnya praktik musyawarah dan deliberasi, misalnya ketika penentuan terkait pendidikan, pembagian peran domestik, ataupun orientasi pilihan hidup tidak lagi diputuskan secara sepihak, melainkan melalui pertukaran pertimbangan antarpihak. Akibatnya, struktur otoritas cenderung menjadi lebih dinamis dan tidak sepenuhnya terpusat pada figur tertentu, karena peran pengambilan keputusan dapat bergeser sesuai konteks, kompetensi, dan kontribusi yang diberikan oleh masing-masing anggota keluarga.

Perubahan ini dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi budaya terhadap kebutuhan psikologis individu berdasarkan teori fungsional Malinowski. Berdasarkan perspektif fungsionalisme, setiap elemen budaya mengalami penyesuaian agar mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik yang bersifat biologis maupun psikologis (Malinowski, 2014).

Kebutuhan generasi muda akan pengakuan, keterlibatan, dan kebebasan dalam menentukan pilihan hidup diwujudkan melalui perubahan pola komunikasi dalam keluarga. Studi mengenai relasi orang tua-anak juga memperlihatkan bahwa komunikasi yang lebih terbuka dan dialogis membantu anak berkembang menjadi lebih mandiri, karena

memungkinkan anak berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan keluarga (Wang et al., 2024). Selain itu, meningkatnya dukungan orang tua terhadap otonomi anak berkorelasi dengan bertambahnya kemandirian, kemampuan pengambilan keputusan, serta penyesuaian sosial yang lebih baik pada anak (Rejaän et al., 2024).

Sehingga, perubahan peran orang tua tidak semestinya dipandang sebagai melemahnya fungsi keluarga. Sebaliknya, perubahan tersebut merupakan penyesuaian yang memungkinkan keluarga tetap menjalankan fungsi utamanya secara lebih adaptif. Pada konteks ini, keluarga tetap berperan sebagai institusi sosial yang menjaga keseimbangan relasi antaranggota, namun melalui pola interaksi yang lebih partisipatif dan responsif terhadap perkembangan individu di dalamnya.

Transformasi Nilai Budaya dan Sistem Kepercayaan

Selain perubahan hubungan dalam keluarga, pergeseran peran orang tua juga dipengaruhi oleh transformasi nilai budaya dan sistem kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Ketika pandangan tentang pendidikan, pengasuhan, serta peran gender berubah, maka orientasi keluarga dalam mengambil keputusan juga ikut bergeser. Selain itu, keyakinan yang dianut oleh masyarakat, misalnya yang berkaitan dengan norma keberhasilan anak, tanggung jawab pengasuhan, serta cara-cara menanamkan nilai moral, juga berkontribusi dalam membentuk pertimbangan orang tua untuk menentukan pola asuh dan praktik sehari-hari. Tabel 4 berikut menunjukkan secara lebih rinci bagaimana perubahan-perubahan tersebut tampak dalam pergeseran pertimbangan dalam penentuan *bōwō* (mahar).

Tabel 4. Pertimbangan dalam Penentuan *Bōwō* (Mahar)

Faktor Pertimbangan	Dulu	Sekarang
Status sosial	Dominan	Sekunder
Kemampuan ekonomi	Kurang diperhatikan	Sangat diperhatikan
Pendidikan	Tidak penting	Penting
Cinta pasangan	Tidak utama	Utama
Nilai agama	Tidak dominan	Dominan

Sumber : Data primer hasil penelitian, 2026

Tabel 4 memperlihatkan bahwa kriteria yang digunakan untuk menentukan *bōwō* (mahar) telah berubah secara signifikan. Jika sebelumnya *bōwō* (mahar) berfokus pada simbol status sosial dan kehormatan keluarga, saat ini lebih dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kasih sayang, dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Perubahan ini sejalan dengan penelitian antropologi tentang mahar atau kekayaan perkawinan, yang menunjukkan bahwa pemberian mahar berfungsi sebagai simbol prestise, kehormatan, dan legitimasi hubungan keluarga dalam masyarakat tradisional (Anderson, 2007). Namun, maknanya cenderung menjadi lebih pragmatis di masyarakat yang mengalami perubahan sosial dan ekonomi. Hal ini terjadi karena perundingan yang mempertimbangkan hubungan emosional dan kemampuan ekonomi pasangan (Dalmia & Lawrence, 2005; Kabeer, 2019; Tampubolon et al., 2024). Sehingga dapat dimaklumi bahwa saat ini *bōwō* (mahar) tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai status sosial. Namun telah bergeser menjadi mekanisme

untuk mencapai kesepakatan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan lingkungan sosial yang lebih modern.

Selain itu, perubahan ini mengindikasikan adanya pergeseran nilai dari orientasi simbolik menuju orientasi fungsional. Bila sebelumnya *bōwō* (mahar) difungsikan terutama untuk mempertahankan makna-makna simbolik, kini *bōwō* (mahar) lebih dipandang sebagai instrumen yang menjalankan fungsi sosial dan praktis dalam kehidupan keluarga. Hasil ini mendukung penelitian Waruwu & Karliani (2024) yang menyatakan bahwa *bōwō* (mahar) tidak lagi dimaknai semata-mata sebagai lambang kehormatan, melainkan juga sebagai beban finansial yang perlu disesuaikan dengan kondisi nyata. Penyesuaian tersebut mencerminkan adanya pertimbangan rasional, khususnya berkaitan dengan kemampuan ekonomi, tanpa harus menghilangkan makna relasi dan kehormatan keluarga, hanya saja penekanannya berubah.

Nilai agama juga memiliki peran yang sangat kuat dalam dinamika perubahan ini. Seluruh informan dalam penelitian ini beragama Kristen, sehingga nilai kasih menjadi dasar dalam pengambilan keputusan keluarga. Untuk konteks tersebut, pelaksanaan *bōwō* (mahar) tidak dipandang hanya sebagai tradisi sosial, tetapi juga sebagai praktik yang harus selaras dengan ajaran moral dan nilai spiritual. Hal ini sejalan dengan studi Mendrofa (2024) dan Sunggu et al. (2023) yang menegaskan bahwa nilai religius berkontribusi dalam membentuk praktik sosial yang lebih humanis, yaitu lebih menekankan penghormatan, kepedulian, dan kesejahteraan relasi antarkeluarga.

Berdasarkan perspektif fungsionalisme Malinowski, perubahan yang terjadi menunjukkan bahwa budaya pada dasarnya tidak kehilangan fungsinya, melainkan mengalami penyesuaian bentuk sesuai kebutuhan masyarakat (Malinowski, 2014). *Bōwō* (mahar) tetap berfungsi sebagai sarana menjaga hubungan sosial dan keharmonisan keluarga, tetapi wujud dan cara pelaksanaannya menjadi lebih adaptif. Atau dengan kata lain, *bōwō* (mahar) tetap menjadi mekanisme sosial untuk merawat keterikatan dan harmoni, hanya saja kini lebih responsif terhadap kebutuhan emosional (kasih dan keterikatan) serta kebutuhan spiritual (nilai agama), sekaligus mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga.

Pengaruh Struktur Sosial-Ekonomi dan Modernisasi

Faktor-faktor eksternal juga dipengaruhi terutama oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan arus modernisasi. Untuk mengidentifikasi jenis faktor yang berperan, tabel 5 berikut menyajikan klasifikasi faktor internal dan eksternal.

Tabel 5. Klasifikasi Faktor Internal dan Eksternal		
Jenis Faktor	Faktor	Sumber
Internal keluarga	Komunikasi pasangan	Anak & orang tua
Internal keluarga	Hubungan emosional	Orang tua
Eksternal sosial	Pendidikan	Lingkungan
Eksternal sosial	Modernisasi	Masyarakat
Eksternal budaya	Agama	Gereja

Eksternal ekonomi	Kondisi ekonomi	Realitas sosial
----------------------	-----------------	-----------------

Sumber : Data primer hasil penelitian, 2026

Tabel 5 memperlihatkan bahwa variabel luar seperti ekonomi, pendidikan, dan modernisasi berkontribusi secara signifikan terhadap perubahan peran orang tua. Artinya, transformasi yang terjadi pada praktik dan orientasi peran orang tua tidak semata-mata muncul dari dinamika internal keluarga, melainkan juga dipengaruhi oleh situasi sosial yang lebih luas. Pada konteks ini, pergeseran budaya dapat dipahami sebagai respons terhadap tekanan struktural yang datang dari masyarakat, termasuk perubahan norma, tuntutan pekerjaan, serta cara pandang yang berkembang di lingkungan tempat keluarga berada. Selain itu, perubahan tersebut juga bisa menimbulkan “penyesuaian” di dalam keluarga karena terdapat perbedaan pandangan antargenerasi mengenai cara mendidik, mengatur ekonomi rumah tangga, dan memaknai tanggung jawab orang tua.

Pada konteks kajian sosiologi keluarga, perubahan dalam praktik keluarga dipahami sebagai hasil interaksi kompleks antara dinamika internal keluarga dan transformasi sosial yang lebih luas. Teori strukturasi Giddens (1986) menegaskan bahwa praktik sosial terbentuk melalui relasi timbal balik antara agen (individu/keluarga) dan struktur sosial. Sementara Furstenberg (2019) memperlihatkan bahwa dinamika keluarga berkembang secara bertahap melalui adaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Dinamika internal mencakup pengaturan peran, pola pengasuhan, dan hubungan antaranggota keluarga, sedangkan transformasi sosial meliputi pergeseran kondisi ekonomi, arus urbanisasi, dan perkembangan sistem pendidikan, yang pada akhirnya mendorong keluarga untuk menyesuaikan pola pengambilan keputusan, termasuk pembagian peran orang tua.

Dinamika internal ini bisa berupa cara keluarga mengatur peran, pola pengasuhan, relasi antaranggota keluarga, serta perubahan tujuan atau strategi keluarga dalam merespons tantangan sehari-hari. Pada saat yang sama, transformasi sosial mencakup berbagai perubahan struktural seperti pergeseran kondisi ekonomi, arus urbanisasi, serta perkembangan sistem pendidikan. Ketika faktor-faktor tersebut meningkat, keluarga cenderung menyesuaikan pola pengambilan keputusan, termasuk dalam hal pembagian peran orang tua, agar selaras dengan kebutuhan baru yang muncul dalam kehidupan sosial masyarakat (Furstenberg, 2019).

Selain itu, penelitian mengenai perubahan keluarga dalam konteks global memperlihatkan bahwa sistem keluarga secara terus-menerus beradaptasi terhadap tekanan struktural. Perubahan nilai sosial dan ekonomi sering kali mendorong munculnya cara-cara baru dalam memahami tanggung jawab orang tua, relasi keluarga, serta bentuk-bentuk dukungan yang diberikan dalam kehidupan rumah tangga (Amato, 2000). Pada banyak masyarakat, modernisasi dan peningkatan akses terhadap pendidikan dapat menyebabkan perubahan orientasi keluarga, misalnya terkait dengan prioritas karier, cara mengasuh anak, dan ekspektasi terhadap kualitas hidup keluarga. Akibatnya, perubahan pola keluarga dapat berdampak langsung pada kualitas hidup dan kualitas relasi dalam keluarga, baik melalui perubahan kesempatan sosial-ekonomi maupun melalui penyesuaian norma dan nilai yang mengatur kehidupan keluarga (Furstenberg, 2019).

Pada konteks ini, pergeseran peran orang tua dalam penentuan *bōwō* (mahar) dapat dipahami sebagai respons adaptif terhadap dinamika struktural yang memengaruhi kehidupan sosial secara lebih luas. Artinya, perubahan tersebut bukan hanya soal perubahan di dalam

keluarga, melainkan juga merupakan konsekuensi dari perubahan lingkungan sosial yang membentuk ulang praktik-praktik keluarga melalui tuntutan, peluang, dan pembatasan yang berbeda dari masa ke masa. Oleh karena itu, memahami pergeseran peran orang tua perlu menempatkannya dalam kerangka hubungan timbal balik antara dinamika internal keluarga dan perubahan sosial yang berlangsung di luar keluarga.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat desa Hilizihõnõ berada dalam kondisi ekonomi yang terbatas. Kondisi ini membuat keluarga harus lebih berhati-hati dalam merencanakan kebutuhan sehari-hari dan mengambil keputusan sosial-budaya yang berkaitan dengan pengeluaran. Akibatnya, masyarakat cenderung mengubah kebiasaan *bõwõ* (mahar) agar tidak menjadi beban ekonomi yang terlalu berat. Atau dengan kata lain, praktik budaya yang sebelumnya berjalan dengan pola tertentu harus ditinjau ulang agar tetap dapat dilaksanakan tanpa mengganggu stabilitas keuangan rumah tangga. Pada konteks ini dapat diindikasikan bahwa kondisi material masyarakat selalu memiliki keterkaitan dengan praktik budaya (Gudeman, 1986; Hornborg, 2024). Oleh sebab itu, perubahan dalam penentuan *bõwõ* (mahar) dapat dilihat sebagai strategi adaptasi: keluarga menyesuaikan aturan dan praktik yang dipandang penting dengan realitas ekonomi yang mereka hadapi, agar tujuan sosial-budaya tetap dapat berjalan secara realistis.

Selanjutnya, pendidikan dan modernisasi juga memainkan peran penting dalam mengubah perspektif masyarakat. Generasi muda yang memiliki akses pendidikan lebih tinggi umumnya mengembangkan cara berpikir yang lebih rasional, reflektif, dan terbuka terhadap alternatif dalam menjalankan peran sosial. Mereka cenderung mempertimbangkan manfaat, efisiensi, dan dampak jangka panjang dari suatu praktik, dibanding hanya mempertahankan tradisi secara apa adanya. Hal ini sejalan dengan teori modernisasi yang dikemukakan oleh Ronald & Baker (2000), yang menyatakan bahwa perubahan sosial mendorong pergeseran nilai dari yang lebih tradisional menuju nilai yang semakin rasional. Ketika masyarakat semakin terpapar informasi melalui pendidikan dan perkembangan teknologi, maka standar “yang dianggap benar” atau “yang dianggap layak” dalam praktik budaya ikut bergeser.

Selanjutnya, menurut perspektif fungsionalisme, perubahan yang terjadi memperlihatkan bahwa sistem budaya memiliki kemampuan untuk beradaptasi guna menjaga stabilitas sosial. Fungsionalisme memandang bahwa budaya akan terus mengalami penyesuaian agar tetap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat (Malinowski, 2014). Ketika praktik adat tidak disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi yang berubah, praktik tersebut berpotensi kehilangan relevansinya dan kemudian ditinggalkan, digantikan, atau mengalami modifikasi. Sehingga, tradisi tidak selalu berarti sesuatu yang statis; tradisi justru dapat berubah bentuk agar tetap berfungsi dalam kehidupan sosial modern. Perubahan peran orang tua yang ditampilkan pada Tabel 5 dapat dimaknai sebagai upaya masyarakat untuk mempertahankan keteraturan sosial dan keberlangsungan keluarga di tengah perubahan lingkungan yang semakin kompleks.

Adaptasi Budaya dalam Perspektif Fungsionalisme

Secara keseluruhan, temuan penelitian memperlihatkan bahwa perubahan peran orang tua dalam penentuan *bõwõ* (mahar) tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari interaksi yang kompleks antara elemen yang berada di dalam keluarga dan elemen yang berasal dari luar keluarga. Faktor internal di dalam keluarga, dinamika seperti pemahaman, pengalaman, serta nilai yang diturunkan oleh orang tua kepada anak berperan dalam

membentuk cara pandang mereka terhadap praktik *bōwō* (mahar). Sementara itu, faktor eksternal masyarakat, misalnya perubahan cara hidup, tuntutan sosial-budaya, perkembangan pengetahuan, serta pengaruh lingkungan yang semakin beragam juga ikut mendorong terjadinya penyesuaian dalam praktik tersebut.

Perubahan dalam praktik penentuan *bōwō* (mahar) dalam penelitian mengenai mahar atau kekayaan pengantin tidak hanya dipengaruhi oleh relasi internal keluarga secara keseluruhan. Akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural yang lebih luas. Secara khusus, perubahan nilai sosial yang tercermin pada pergeseran pandangan masyarakat terhadap institusi perkawinan, relasi gender, serta signifikansi mahar dalam konteks ekonomi turut berkontribusi terhadap transformasi praktik tersebut. Selain itu, kondisi ekonomi keluarga (misalnya perubahan tingkat pendapatan, meningkatnya biaya hidup, dan variasi kemampuan finansial) mendorong adanya adaptasi (penyesuaian) terhadap besaran jumlah maupun bentuk mahar agar selaras dengan realitas material yang dihadapi.

Selanjutnya, proses modernisasi turut berperan melalui perubahan pola interaksi sosial dan mekanisme negosiasi antar keluarga. Hal ini dimaklumi karena terbukanya akses yang lebih luas terhadap informasi, pendidikan, dan ragam perspektif budaya memunculkan bentuk persetujuan yang lebih deliberatif serta membuka ruang pertimbangan yang lebih variatif dalam penentuan mahar atau *bōwō* seperti yang dibahas dalam penelitian ini. Sehingga, pada konteks ini mekanisme penetapan *bōwō* (mahar) tidak lagi sepenuhnya bersifat deterministik oleh tradisi, melainkan semakin ditentukan oleh interaksi antara norma budaya dan tuntutan kontekstual.

Beberapa penelitian juga memperlihatkan bahwa tekanan ekonomi yang meningkat serta perubahan preferensi individu menjadi faktor penting yang memfasilitasi transformasi praktik mahar di berbagai masyarakat. Preferensi individu dapat dibentuk oleh pengalaman sosial, proses sosialisasi melalui pendidikan, maupun pengaruh perubahan norma yang menekankan fleksibilitas dalam relasi keluarga dan perkawinan. Ketika pasangan dan keluarga memandang mahar sebagai bagian dari negosiasi sosial yang memengaruhi keberlanjutan rumah tangga, proses penentuannya cenderung bergerak menuju mekanisme yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kesanggupan para pihak. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya tingkat fleksibilitas dalam penentuan mahar, baik dalam aspek kuantitas, ragam komponen, maupun skema waktu penyerahan. Praktik tersebut kemudian menjadi lebih berorientasi pada kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat, sebagaimana ditunjukkan dalam hasil penelitian terdahulu (Anderson, 2007; Lowes & Nunn, 2018; Voena et al., 2019).

Sehubungan dengan hal tersebut, perubahan peran orang tua dalam penentuan *bōwō* (mahar) dapat dipahami sebagai hasil dari dinamika hubungan antara nilai-nilai internal keluarga dan tekanan struktural eksternal. Walaupun orang tua tetap berfungsi sebagai penyangga norma, otoritas sosial, dan legitimasi kultural dalam proses penentuan mahar, strategi yang mereka gunakan cenderung mengalami penyesuaian untuk merespons perubahan kondisi sosial-ekonomi serta pergeseran ekspektasi normatif. Penyesuaian ini dapat terlihat pada perumusan ulang pertimbangan besaran mahar berdasarkan kapasitas finansial, pelibatan aspirasi pasangan, serta kemampuan orang tua untuk mengartikulasikan tradisi agar tetap dapat diterima dalam konfigurasi sosial yang berubah. Oleh sebab itu, transformasi peran orang tua bukan semata-mata berarti pelemahan tradisi, melainkan mencerminkan adanya proses rekonstruksi budaya yang berlangsung secara bertahap dan dipengaruhi oleh dinamika sosial yang lebih luas.

Transformasi peran orang tua pada penelitian ini dipahami bukan sebagai pelemahan tradisi. Melainkan munculnya proses rekonstruksi budaya yang berlangsung secara bertahap dan dipengaruhi oleh dinamika sosial yang lebih luas. Perubahan praktik, seperti mahar atau kekayaan dalam pernikahan, dalam kajian antropologi perkawinan dipahami sebagai proses perundingan yang berkelanjutan antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan sosial-ekonomi modern, sehingga tradisi tidak hilang, melainkan mengalami penyesuaian bentuk dan makna.

Selain itu, beberapa penelitian tentang keluarga memperlihatkan bahwa orang tua tidak selalu mempertahankan nilai-nilai tertentu secara kaku, melainkan cenderung beradaptasi dengan perubahan sosial demi kepentingan anak. Adaptasi ini terutama terlihat dalam aspek pendidikan, pendapatan, dan kebahagiaan dalam perkawinan. Pada kajian antropologi perkawinan, proses perundingan keluarga yang mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi dan kesejahteraan generasi muda sering kali berdampak pada perubahan praktik mahar atau kekayaan pengantin (De Genova, 2017; Lowes & Nunn, 2018; Voena et al., 2019).

Lebih lanjut, studi juga mengindikasikan bahwa keluarga berperan aktif dalam menafsirkan ulang tradisi agar tetap selaras dengan kebutuhan masa kini. Dengan demikian, orang tua tidak hanya berfungsi sebagai penjaga tradisi, tetapi juga bertindak sebagai agen yang menyesuaikan praktik budaya sesuai dengan perubahan kondisi sosial serta aspirasi anak (Bourdieu, 2013; Fortunato et al., 2006; Goody & Tambiah, n.d.). Oleh karena itu, perubahan peran orang tua dalam penentuan *bōwō* (mahar) dapat dipahami sebagai rekonstruksi budaya yang bersifat adaptif, bukan sebagai bentuk penurunan atau “degradasi” tradisi.

Berdasarkan perspektif teori fungsional Malinowski, perubahan yang terjadi tidak dapat dipahami sebagai disfungsi budaya yang merusak sistem sosial, melainkan sebagai bentuk adaptasi budaya untuk menjawab kebutuhan baru masyarakat (Malinowski, 2014). Artinya, walaupun bentuk dan mekanisme penentuan *bōwō* (mahar) mengalami modifikasi, namun *bōwō* (mahar) tetap menjalankan fungsi utamanya dalam menjaga keteraturan sosial, memperkuat ikatan relasi, serta memelihara keharmonisan dalam keluarga. Pada konteks ini, orang tua berperan sebagai pihak yang menegosiasikan kesesuaian praktik budaya dengan kondisi sosial yang berkembang, sehingga praktik *bōwō* (mahar) tetap relevan dan dapat diterima dalam kehidupan sehari-hari.

Hal ini memperlihatkan bahwa budaya bersifat dinamis dan selalu bertransformasi sesuai perkembangan zaman, tanpa harus kehilangan makna esensialnya. Oleh sebab itu, keberlanjutan budaya tidak semata-mata ditentukan oleh bentuk yang tidak berubah, melainkan oleh kemampuan budaya tersebut untuk beradaptasi dan mempertahankan fungsi sosialnya agar tetap bermanfaat bagi masyarakat (Eriksen, 2023).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perubahan peran orang tua dalam penentuan *bōwō* (mahar) pada etnis Nias di Desa Hilizihññ adalah hasil dari interaksi antara faktor internal keluarga dan faktor eksternal yang lebih luas, seperti kondisi ekonomi, pendidikan, modernisasi, dan perubahan nilai sosial dan keagamaan. Pola hubungan keluarga yang dulunya hierarkis berubah menjadi lebih egaliter dan partisipatif. Orang tua tidak lagi menjadi satu-satunya pengambil keputusan, tetapi berperan sebagai fasilitator dalam proses perundingan keluarga. Selain itu, perubahan dalam pertimbangan penentuan *bōwō* (mahar) memperlihatkan adanya pergeseran nilai dari orientasi simbolik, yang menekankan status sosial dan kehormatan, menuju orientasi yang lebih fungsional, seperti kesejahteraan,

kemampuan ekonomi, dan kebahagiaan pasangan. Berdasarkan perspektif fungsionalisme, perubahan ini mengindikasikan adanya adaptasi dan rekonstruksi budaya yang memungkinkan praktik *bōwō* (mahar) tetap hidup dalam koneksi.

Sejalan dengan hasilnya, masyarakat dan pemangku adat harus terus mengembangkan praktik *bōwō* (mahar) yang lebih fleksibel tanpa menghilangkan nilai-nilai pentingnya sebagai representasi kekerabatan dan hubungan sosial. Selain itu, dalam proses penentuan *bōwō* (mahar), diperlukan ruang diskusi yang lebih terbuka antara orang tua dan generasi muda. Hal ini dibutuhkan agar tercipta keseimbangan antara mempertahankan tradisi dan memenuhi kebutuhan zaman sekarang. Untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang transformasi budaya dalam masyarakat modern, peneliti selanjutnya harus menyelidiki dinamika perubahan praktik adat perkawinan dalam konteks yang lebih luas, baik secara komparatif antar daerah maupun dengan pendekatan teoritis yang lebih beragam

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini. Artikel ini merupakan hasil pengembangan dari penelitian skripsi mahasiswa yang dilaksanakan dengan bimbingan dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pendampingan sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing akademik yang telah memberikan masukan konstruktif selama proses penelitian dan penulisan artikel, serta kepada dosen yang turut membantu dalam penyempurnaan penulisan artikel ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, sebagai tempat menimba ilmu dan mengembangkan kapasitas akademik selama masa studi. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh informan dan perangkat Desa Hilizihōnō yang telah memberikan informasi, dukungan, dan partisipasi selama proses penelitian berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Amato, P. (2000). The Consequences of Divorce for Adults and Children: An Update. *Journal of Marriage and Family*, 62, 1269–1287. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2000.01269.x>
- Anderson, S. (2007). The Economics of Dowry and Brideprice. *The Journal of Economic Perspectives*, 21(4), 151–174. <http://www.jstor.org/stable/30033756>
- Bourdieu, P. (2013). Outline of A Theory of Paractice. In E. Gellner, J. Goody, S. Gudeman, M. Herzeld, & J. Parry (Eds.), *Readings for a History of Anthropological Theory, Sixth Edition*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511812507>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th Editio). SAGE. <https://books.google.co.id/books?id=b9tFzwEACAAJ>
- Dalmia, S., & Lawrence, P. (2005). The Institution of Dowry in India: Why It Continues To Prevail. *The Journal of Developing Areas*, 38, 71–93. <https://doi.org/10.1353/jda.2005.0018>
- De Genova, N. (2017). *The Borders of "Europe"* (N. DE GENOVA (ed.)). Duke University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv11smr05>

- Eriksen, T. H. (2023). *Small Places, Large Issues: An Introduction to Social and Cultural Anthropology* (NED-New edition, 5, Fifth Edition). Pluto Press. <https://doi.org/10.2307/jj.4418237>
- Fortunato, L., Holden, C., & Mace, R. (2006). From bridewealth to dowry? *Human Nature*, 17, 355–376. <https://doi.org/10.1007/s12110-006-1000-4>
- Furstenberg, F. (2019). Family Change in Global Perspective: How and Why Family Systems Change. *Family Relations*, 68. <https://doi.org/10.1111/fare.12361>
- Giddens, A. (1986). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. University of California Press. <https://books.google.co.id/books?id=cV8xnSIa0-IC>
- Goody, J. R., & Tambiah, S. J. (n.d.). *Bridewealth and dowry*. UK. https://unesdoc.unesco.org/notice?id=p::usmarcdef_0000032850
- Gudeman, S. (1986). *Economics as Culture: Models and Metaphors of Livelihood*. Routledge & K. Paul. <https://books.google.co.id/books?id=g04OAAAAQAAJ>
- Gulo, I. T. K., & Telaumbanua, T. (2021). Böwö Wangowalu: Perlukah Ditransformasi? *Sundermann*, 14(2), 78–86. <https://doi.org/10.36588/sundermann.v14i2.64>
- Hornborg, A. (2024). Defetishizing money: Perspectives from economic anthropology: Gudeman Lecture, University of Minnesota, March 20, 2023. *HAU: Journal of Ethnographic Theory*, 14(2), 310–319. <https://doi.org/10.1086/731656>
- Jones, G. W. (2017). Changing marriage patterns in Asia. In Z. Zhao, A. C. B. T.-R. H. of A. D. Hates, Z. Zhao, & A. C. Hates (Eds.), *Routledge Handbook of Asian Demography* (pp. 351–369). Routledge as part of Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781315148458>
- Kabeer, N. (2019). Randomized Control Trials and Qualitative Evaluations of a Multifaceted Programme for Women in Extreme Poverty: Empirical Findings and Methodological Reflections. *Journal of Human Development and Capabilities*, 20, 197–217. <https://doi.org/10.1080/19452829.2018.1536696>
- Killen, M. (ed), & Smetana, J. G. (ed). (2022). Handbook of Moral Development. In M. (ed) Killen & J. G. (ed) Smetana (Eds.), *Handbook of Moral Development* (2nd editio). Psychology Press. <https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9781003047247/handbook-moral-development-melanie-killen-judith-smetana>
- Lafau, I. E., & Fitriani, E. (2023). Proses Negosiasi Penentuan Böwö dalam Adat Perkawinan Nias. *Culture & Society: Journal of Anthropological Research*, 5(1), 1–12. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.24036/csjar.v5i2.129](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.24036/csjar.v5i2.129)
- Lowes, S., & Nunn, N. (2018). *Bride Price and the Well-Being of Women* (pp. 117–138). <https://doi.org/10.1093/oso/9780198829591.003.0006>
- Malinowski, B. (2014). *A Scientific Theory of Culture and Other Essays*. <https://doi.org/10.4324/9781315824109>
- Mendrofa, K. (2024). Bowo Perkawinan Adat Suku Nias Dengan Dasar Perkawinan Gereja Katolik perubahan penurunan arti Böwö yang sesungguhnya , karena pemahaman tentang Böwö dan. *Jurnal Magistra*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.62200/magistra.v2i1.88>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook. In *SAGE Publications* (4th Editio). SAGE Publications. <https://doi.org/LK -https://worldcat.org/title/1047532295>
- Rejaän, Z., Valk, I., Schrama, W., & Branje, S. (2024). Parenting, Coparenting, and Adolescents'

- Sense of Autonomy and Belonging After Divorce. *Journal of Youth and Adolescence*, 53. <https://doi.org/10.1007/s10964-024-01963-2>
- Ronald, I., & Baker, W. (2000). Modernization, Cultural Change, and the Persistence of Traditional Values. *American Sociological Review*, 65, 19–51. <https://doi.org/10.2307/2657288>
- Savitri, N., & Zalukhu, M. (2016). Diskriminasi Dalam Hukum Perkawinan (Penelitian Atas Hukum Perkawinan Adat Suku Nias). *Masalah-Masalah Hukum*, 45(3), 224–232.
- Smetana, J., & Rote, W. (2019). Adolescent–Parent Relationships: Progress, Processes, and Prospects. *Annual Review of Developmental Psychology*, 1, 41–68. <https://doi.org/10.1146/annurev-devpsych-121318-084903>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd Editio). Alfabeta.
- Sunggu, F. O., Giawa, A., & Endi, Y. (2023). Pandangan Gereja Katolik Perkawinan Suku Nias terhadap Böwö dalam Tradisi. *GAUDIUM VESTRUM : JURNAL KATEKETIK PASTORAL*, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.61831/gvjkp.v7i2.187>
- Tampubolon, G., Simanjuntak, H., Arihta, J., Sigiro, L., & Lubis, F. (2024). Pergeseran Makna Böwo pada Pesta Pernikahan Adat Suku Nias di Era Modern Saat Ini. *AR-RUMMAN Journal of Education and Learning Evaluation*, 1, 249–254. <https://doi.org/10.57235/arrumman.v1i2.3974>
- Voena, A., Ashraf, N., Bau, N., & Nunn, N. (2019). Bride Price and Female Education. *Journal of Political Economy*, 128. <https://doi.org/10.1086/704572>
- Wang, Y., Esteinou, R., & Xia, Y. (2024). *Adolescent Autonomy and Parent-Adolescent Communication: A Comparative Critical Review of English, Chinese, and Spanish Literature* (pp. 267–291). https://doi.org/10.1007/978-3-031-49230-3_13
- Waruwu, F., & Karliani, E. (2024). Pergeseran Makna Bowo Pada Pesta Pernikahan Adat Suku Nias Desa Sisobahili Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, 2024(16), 59–65.